

Karya Ilmiah

METODE KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

Oleh :

Muhammad Alfikri, S.Sos., MSi



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

21

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas Berkat Dan Ridho Allah Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan baik. Salah satu tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah untuk penilaian kepangkatan dosen, disamping untuk menambah wawasan dosen dalam menyusun karya ilmiah.

Penulis menyadari bahwa penyajian dan isi dari Karya Ilmiah ini masih membutuhkan penambahan dan perbaikan untuk kesempurnaannya. Kiranya isi dari Karya Ilmiah memberikan manfaat dan dapat menjadi masukan dan acuan yang berguna bagi pembaca yang membutuhkannya.

Medan, Desember 2008
Penulis,

Muhammad Alfikri, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penulisan	3
BAB II URAIAN TEORITIS	4
2.1. Pengertian Pedesaan	4
2.2. Otonomi Daerah dan Strategi Pembangunan Pedesaan	7
2.3. Pembangunan Proses Transformasi Sosial Ekonomi bagi Masyarakat Pedesaan	11
2.4. Pembangunan Pedesaan.....	14
2.5. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Peran Kelembagaan Pedesaan	16
2.6. Pola Pengembangan Kelembagaan Sosial Ekonomi Pedesaan Untuk Mengentas Kemiskinan Model Komunitas Sosial Ekonomi	28

BAB III PEMBAHASAN	33
BAB IV PENUTUP.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinyu dan terencana yang ditujukan untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu. Secara ideal, pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Ironisnya, sudah setengah abad lebih Indonesia merdeka, yang secara politis telah melewati tiga orde kepemimpinan nasional, mulai dari orde lama. Orde baru dan orde reformasi, namun pembangunan nasional relatif belum menampakkan hasil yang maksimal. Bahkan jumlah masyarakat miskin semakin tahun semakin bertambah besar, dan kejahatan semakin *meraja lela*. Terlebih lagi apabila dilihat dari pemerataan prioritas

pembangunan antara desa dan kota, juga masih menampakkan adanya ketimpangan yang belum memperoleh penyelesaian yang proporsional.

Kita semua tahu bahwa hingga era Otonomi Daerah telah menapaki tahun ketiga di awal tahun 2002 ini, wilayah Indonesia masih didominasi oleh wilayah pedesaan, yang mengandung pengertian bahwa jumlah penduduk terbesar masih berdomisili di wilayah tersebut. Dengan demikian apabila prioritas pembangunan masih dipusatkan di wilayah perkotaan, itu artinya bahwa masyarakat yang mampu menikmati hasil pembangunan jauh lebih sedikit ketimbang yang tergilas oleh pembangunan.

1.2. Perumusan Masalah

Ketika sistem pemerintahan Indonesia masih bersifat sentralistik, kita sering melontarkan kecaman bahwa ketertinggalan pembangunan wilayah pedesaan merupakan kesalahan pemerintah, karena perencanaan pembangunan pada waktu itu masih didominasi oleh strategi pembangunan yang

bersifat *top-down*. Apabila di era otonomi sebagaimana yang sedang kita alami saat ini, ketertinggalan pembangunan wilayah pedesaan ternyata masih tetap terjadi, lalu kita akan menyalahkan siapa lagi?.

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui metode komunikasi yang efektif.



BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Pedesaan

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (*rural community*), dengan masyarakat perkotaan (*urban community*). Perbedaan tersebut pada hakikatnya bersifat gradual. Agak sulit untuk memberikan batasan apa yang dimaksudkan dengan perkotaan, oleh karena adanya hubungan konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme.

Para sosiolog berpendapat bahwa untuk membedakan antara masyarakat kota dan desa dapat dipelajari melalui karakteristik masyarakat desa, dan ini menjadi kajian disiplin ilmu sosiologi yaitu "sosiologi pedesaan".

Seringkali, bila para sosiolog berbicara tentang masalah pedesaan mereka tertarik untuk membicarakan perilaku kehidupan orang di pedesaan dalam kaitannya dengan kelompok

lain di luar mereka. Jadi, mereka melihat desa sebagai suatu tipe atau bentuk masyarakat dalam arti komunitas kecil yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penduduk kota. Untuk lebih jelasnya, terlebih dahulu akan digambarkan pengertian desa menurut para ahli sosiologi.

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta dari kata *deshi* yang artinya "tanah kelahiran" atau "tanah tumpah darah". Selanjutnya dari kata desa itu, merupakan istilah yang menunjukkan "suatu wilayah hukum di Jawa pada umumnya". Kata yang hampir sama atau sedikit lebih kecil tingkatannya dari desa adalah "dusun, dukuh atau kampung" atau sebutan yang lain lagi yang searti seperti *gampong*, *hukum tua*, *wanua* dan lain sebagainya.

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 1979, istilah desa seperti yang dikemukakan di atas telah diseragamkan untuk seluruh wilayah tanah air Indonesia, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Jadi istilah desa telah menjadi istilah nasional, untuk menunjukkan bahwa kesatuan

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Undang-Undang (UU) No. 22/1999 tentang pemerintah daerah (bab I pasal I ketentuan umum) disebutkan bahwa desa (atau yang disebut nama lain) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Wilayah pedesaan adalah wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Menurut catatan

Departemen Dalam Negeri RI, jumlah desa di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Marauke pada saat ini adalah 68.988 buah.

Menurut Vernor C. Finch, pada dasarnya desa diartikan sebagai suatu tempat tinggal dan bukan merupakan pusat perdagangan atau *the village Islam principally a place of residence and not primarily a bussiness center*. Selain itu, Sutardjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

2.2. Otonomi Daerah Dan Strategi Pembangunan Perdesaan

Sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang sistem Pemerintahan Daerah yang berintikan otonomi, memiliki pemahaman bahwa pihak pemerintah daerah (Kabupaten atau Kota) memperoleh wewenang penuh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu sudah saatnyalah bagi pemerintah daerah untuk segera memikirkan

strategi pembangunan yang bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh agar kue pembangunan benar-benar dapat dinikmati secara lebih merata bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Telah disinggung dibagian atas, bahwa sebagian besar, bahkan mungkin mencapai 2/3 dari jumlah penduduk kita berdiam di wilayah perdesaan, maka seyogyanya gerak dan langkah pembangunan di orde reformasi dan di era otonomi ini lebih diarahkan pada pembangunan desa dan masyarakat desa, serta menciptakan strategi pembangunan yang populis atau yang berdimensi kerakyatan. Artinya bahwa pihak pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya harus diarahkan pada perbaikan sektor ekonomi rakyat yang lemah modal, dan tidak lagi terpaku pada sektor ekonomi konglomerasi yang kuat modal.

Satu hal yang perlu difahami betul oleh pihak pemerintah daerah, ketika pihaknya sudah berketetapan untuk memfokuskan pembangunannya bagi masyarakat desa yang lemah modal adalah terjadinya kelambanan pertumbuhan ekonomi di wilayah

itu, sebab strategi ini memang tidak berorientasi pada *economic growth*, tetapi lebih diorientasikan pada terjadinya *redistribution*, yang bertujuan untuk menekan terjadinya kesenjangan.

Kondisi inilah yang biasanya sangat tidak disukai oleh Pemerintah Daerah, karena kita masih terkungkung oleh paradigma lama yang menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi sebagai indikator dalam menentukan kemajuan atau keberhasilan pembangunan di wilayahnya. Akibatnya, walaupun secara teoritis maupun secara praktis pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti mengandung banyak kelemahan dan boleh dibilang gagal, tetapi masih lebih menggiurkan untuk dilaksanakan, karena pihak pemerintah daerah masih merasa lebih berprestasi apabila pihaknya mampu memacu pertumbuhan ekonomi, ketimbang menekan terjadinya kesenjangan ekonomi.

Sebenarnya bahwa di era otonomi ini, pihak pemerintah daerah seyogyanya tidak perlu mengulangi kesalahan lama.

dalam memilih strategi pembangunan ekonominya, dengan cara sesegera mungkin meninggalkan orientasi pertumbuhan, karena strategi pertumbuhan terbukti semakin memperlebar terjadinya *social and economic gap*.

Menurut Gunawan (1998:6) dalam melakukan pembangunan ekonomi rakyat atau masyarakat desa harus diarahkan untuk segera melakukan perubahan struktural (*structural adjusment and structural transformation*) untuk memperkuat posisi perekonomian rakyat kedalam struktur perekonomian nasional. Agar *structural adjusment and structural transformation* dapat segera terwujud maka diperlukan manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat secara tepat.

Pada orde yang lalu, dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah di perdesaan selalu diawali dengan penguatan modal, sehingga banyak program yang dikemas dengan berbagai nama terbukti gagal.

Berbagai program itu diantaranya BIMAS, INMAS hingga IDT dan KUT serta berpuluh program lainnya terbukti tak pernah

mampu menggemungkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pada waktu itu. Berkaca dari berbagai pengalaman tersebut, maka perlu ditawarkan alternatif lain dalam mengemas program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan perdesaan di era otonomi ini. Salah satu tawaran alternatif itu adalah dalam mengemas suatu program seyogyanya tidak diawali dari suntikan atau penguatan modal, tetapi harus diawali dari pembinaan keahlian atau ketrampilannya terlebih dahulu bagi *target group* yang akan dikenai suatu program. Ketika ketrampilan dan keahlian *target group* tersebut telah dianggap memadai baru suntikan dana atau penguatan modal dilakukan, sehingga dana yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan sektor produksi.

2.3. Pembangunan Proses Transformasi Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Pedesaan

Oleh karena pembangunan selalu bertujuan untuk terciptanya kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik

dari tahun ke tahun yang bersifat kontinyu, dapatlah dikatakan bahwa pembangunan merupakan proses *social and economic transformation* yang disengaja dan terkendali. Oleh karena pembangunan merupakan proses transformasi kearah yang lebih baik, maka pembangunan merupakan hak setiap orang dan harus dinikmati oleh setiap anggota masyarakat, termasuk masyarakat di perdesaan. Mereka harus dibangkitkan dari kondisi dan tingkat kehidupan yang tradisional menuju kearah kehidupan yang lebih maju (Ndraha:1982).

Sedangkan Menurut Gunawan (1998) yang dimaksud dengan transformasi itu terdiri dari; terjadinya perubahan dari ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke arah ekonomi tangguh, dari ekonomi subsisten ke arah ekonomi pasar dan dari kondisi ketergantungan ke arah kondisi kemandirian. Sudah barang tentu transformasi ekonomi masyarakat perdesaan itu baru bisa terjadi apabila pihak pemerintah daerah di era otonomi ini mampu memenuhi beberapa syarat yang dibutuhkan. Beberapa syarat itu diantaranya meliputi;

1. Penguatan Kelembagaan.
2. Pengalokasian Sumber Daya Alam secara proporsional dan ramah lingkungan,
3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
4. Penguasaan teknologi yang tepat dan relevan bagi masyarakat perdesaan
5. Penyediaan modal yang cukup.

Apabila benar bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses transformasi sosial ekonomi, tepatlah yang dikatakan Rogers (dalam Amri; 1993) bahwa pembangunan harus mengandung unsur informasi secara merata melalui proses komunikasi yang efektif. Tanpa komunikasi tak mungkin ada informasi dan tanpa informasi transformasipun tak mungkin terjadi.

Di era otonomi ini, pihak pemerintah daerah dianggap sebagai pihak yang paling berkewajiban membentuk sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi yang transparan, lengkap dan efektif kepada masyarakat di

perdesaan tentang program-program pembangunan yang dicanangkan. Bahkan melalui sarana komunikasi itulah partisipasi yang positif dan konstruktif dari masyarakat terhadap program-program pembangunan dapat ditumbuhkan.

Dalam hal ini Rogers mensinyalir bahwa terjadinya kegagalan pelaksanaan program pembangunan perdesaan, salah satu diantaranya adalah disebabkan oleh terjadinya kesenjangan komunikasi sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat perdesaan menjadi tidak lengkap. Akibat lanjut dari minimnya aliran informasi yang menuju ke wilayah perdesaan tersebut dapat menimbulkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang sekaligus juga menghambat peningkatan kesejahteraan hidup mereka. *

2.4. Pembangunan Pedesaan

Berbicara mengenai pembangunan masyarakat pedesaan maka yang terpikirkan adalah membangun masyarakat miskin atau tertinggal dan sebagian besar penghuni desa-desa. Jadi

masalah pembangunan pedesaan tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan pedesaan terlebih di negara-negara sedang berkembang yang sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan.

Pembangunan daerah pedesaan adalah pembanguinan masyarakat desa secara keseluruhan dan terpadu menuju peningkatan pendapatan perkapita, pendidikan dan keterampilan dan peningkatan kesehatan serta peningkatan produktivitas masyarakat pedesaan (Comprehensive and Integrated Rural Deveopment). Dengan kata lain pembangunan pedesaan adalah suatu proses peningkatan status masyarakat desa dari keterbelakangan sekaligus sebagai proses pengentasan kemiskinan.

TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN menyatakan bahwa pembangunan pedesaan terus didorong dan ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam dan menumbuhkan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat

pedesaan, sehingga masyarakat pedesaan tersebut semakin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam GBHN tersebut di atas, maka prinsip dan strategi pembangunan pedesaan di Indonesia adalah untuk menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat melalui partisipasi langsung dalam proses pembangunan pedesaan untuk mengolah secara maksimal segala potensi dan daya yang dimiliki oleh desa tersebut sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat mengangkat daerah pedesaan dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Lambatnya laju pembangunan di daerah pedesaan juga dipengaruhi oleh masalah kurangnya dana dan sumber-sumber modal yang tersedia untuk pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.

2.5. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Peran Kelembagaan Pedesaan

Apabila kemiskinan dianikan secara luas sebagai kondisi ketidakcukupan dan ketidak berdayaan warga masyarakat dalam

memenuhi segi kebutuhan tertentu menurut sistem nilai yang dianut masyarakat, maka sebenarnya kemiskinan itu selalu ada dalam setiap masyarakat. Tanpa peduli, apakah masyarakat tersebut sudah maju taraf budayanya, maupun yang sedang berkembang.

Kemiskinan bila ditinjau dari sebab-musababnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan struktural dan kultural (Siahaan, 1993; Anonim, 1994b). Kemiskinan struktural terjadi karena kepincangan struktural sistem sosial, sehingga orang tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia, atau usaha yang dilakukan untuk memperbaiki nasibnya selalu terbentur dengan sistem yang berlaku. Sedangkan kemiskinan kultural merupakan kemiskinan alamiah sifatnya, yakni penduduk yang sejak lahir sudah berada dalam lingkungan miskin.

Khususnya menyangkut kemiskinan kultural, menurut Lewis (dalam Long, 1992) timbul dalam masyarakat yang sistem sosial ekonominya secara keseluruhan terlibat dalam proses transformasi yang cepat, dan dalam masa alih teknologi yang

cepat, yang disebut sebagai periode transisi menuju sistem kapitalis. Kondisi ini ditandai dengan beberapa faktor, di antaranya seperti status ekonomi yang rendah (dianggap sebagai inferioritas seseorang), pengangguran yang tinggi dan tingkat upah yang rendah. Orang yang terlibat dalam kemiskinan ini dibedakan menurut tipe ideal yang memiliki sifat ideal antara lain seperti: kurangnya partisipasi dan integrasi lembaga-lembaga penting yang ada di dalam masyarakat yang lebih luas. Bersamaan dengan itu timbul sikap kritis terhadap masyarakat di luar subkultur, misalnya adanya kecurigaan terhadap pemerintah, tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat buta huruf yang tinggi, anak-anak harus mandiri pada usia yang relatif muda (Siahaan, 1993).

BAPPENAS (Anonim, 1994b) menggunakan dasar pemikiran bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki si miskin, melainkan tidak dapat dihindari dengan kekuatannya sendiri. Kemiskinan antarlain ditandai oleh sikap dan tingkahlaku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan

untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan Pedesaan menurut rumusan Bank Dunia, adalah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi lapisan masyarakat tertentu, masyarakat pedesaan yang miskin dan melibatkan secara luas manfaat dari pola pembangunan untuk kelompok termiskin diantara mereka yang mencari nafkah di pedesaan (Alala, 1992). Khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat, PBB lebih menekankan pada proses dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberikan kesempatan secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa (Conyers, 1987).

Tujuan dan strategi pembangunan pedesaan di Indonesia, secara umum antara lain seperi tenuous dalam GBHN, yaitu bahwa "Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkalkan, terutama melalui pembangunan kemampuan sumber daya manusia, termasuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sena mengelola dan memasarkan produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, maka masyarakat pedesaan semakin mampu menggerakkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala daya dan dana bagi peningkatan pendapatan dan tarahhidupnya".

Upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan dalam PJP II, selain ditempuh dengan melanjutkan program-program sektoral yang telah terbukti cukup berhasil pada periode pembangunan sebelumnya, juga akan semakin intensif pelaksanaannya dengan pendekatan terpadu melalui program Inpres Desa Teninggal. Program IDT adalah suatu program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan

taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu program IDT diarahkan kepada kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin di desa atau kelurahan tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat.

Lembaga sosial ekonomi secara umum diartikan sebagai organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas sosial dan hasil-hasilnya (Gillin and Gillin dalam Soekanto, 1990). Wujud dari suatu lembaga sosial adalah berupa norma dan wadah atau asosiasi yang berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi.

Oleh karena pembangunan pedesaan merupakan suatu strategi yang dirancang guna memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi golongan miskin maka usaha untuk pemeratakan pendapatan dituntut adanya perbaikan kelembagaan (Juoro, 1985). Menurut Soekartawi (1990), aspek kelembagaan sangat

penting bukan saja dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan, tetapi juga segi ekonomi pedesaan. Dikatakan, bahkan aspek kelembagaan merupakan syarat pokok yang diperlukan agar struktur pembangunan di pedesaan dikatakan maju sebagaimana yang dikemukakan Mosher (1974).

Dalam hubungannya dengan model pembangunan pedesaan, Samonte (dalam Ndraha, 1987) berpendapat bahwa basis strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat desa secara langsung dalam setiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal, yang membedakannya dari pembangunan lainnya (Ndraha, 1987).

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi enam tahapan, yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan akhirnya penerimaan

kembali hasil pembangunan. Sebagai masukan (input) pembangunan, partisipasi berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sedangkan sebagai keluaran (output), partisipasi merupakan keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya, seperti lomba desa, subsidi desa, dan sebagainya. Apabila partisipasi yang dilakukan itu meliputi semua tahap dalam proses pembangunan, maka disebut partisipasi profesional. Sebaliknya bila dilakukan hanya pada tahap-tahap tertentu saja maka disebut sebagai partisipasi parsial (Ndraha, 1987).

Dari berbagai hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi antara lain seperti yang disimpulkan dan Ndraha (1982, 1987) adalah (a) adanya buta huruf, sifat acuh, kemiskinan dan kemunduran, rendahnya kualitas kepemimpinan lokal; (b) lemahnya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; (c) lemahnya partisipasi karena kegiatan tertentu dalam program pembangunan kurang cocok atau bertentangan dengan nilai dan norma setempat; (d) lemahnya partisipasi karena tidak memanfaatkan organisasi yang

sudah dikenal atau telah ada di tengah masyarakat; (e) lemahnya partisipasi karena tidak dapat memberikan manfaat secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Simposium PERHEPI (Anonim, 1994c) antara lain merumuskan beberapa masalah dan peluang yang dihadapi dalam PELITA VI dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan, adalah bahwa perananan kelembagaan yang ada belum sepenuhnya memberikan kontribusi riil terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Adanya kecenderungan penurunan produktivitas, kesenjangan antarsektor dan sub-sektor, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya yang secara langsung menyentuh masyarakat miskin dan masih berlanjutnya sistem dualistik ekonomi dan belum ada keterpaduan antarlembaga.

Dalam pada itu kehidupan suatu masyarakat, menurut Patrick Geddes (dalam Belling dan Totten, 1985), didukung oleh tiga hal yang disebut tripod (tiga kaki), yaitu tanah, rakyat, dan kerja. Kemudian Geddes mentrans-formasikannya dalam pengertian- pengertian geografis, sosiologis, dan ekonomi.

Konsep tersebut dapat diterapkan untuk memahami kemiskinan di pedesaan dan merumuskan model dan menentukan metode penanggulangannya.

Struktur sosial suatu masyarakat menurut pandangan antropogeografis ditentukan oleh keadaan geografis tempat masyarakat itu hidup. Lembaga sosial sebagai salah satu unsur pokok dalam struktur sistem sosial, bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya baik dari segi struktur maupun fungsinya mencerminkan pola adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa bila tidak ada pengaruh luar terhadap perubahan sosial, maka masyarakat yang berdekatan secara geografis juga menunjukkan penyebaran wilayah budayanya.

Berdasarkan teori Erasmus tentang *culture causality*, faktor geografis merupakan penyebab pasif terhadap perubahan kebudayaan dan lebih bersifat *limitative causes* (Soewardi, 1979). Dengan demikian kemiskinan sebagai suatu fenomena kultural lag bila ditinjau dari perkembangan sosial ekonomi tentunya lebih dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebagai pelaku aktif

perubahan budaya. Pada sisi lainnya bila dilihat dari fungsi lembaga sosial, menurut penganut determinisme sosial, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia ditentukan oleh sistem kelembagaan yang berlaku. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada pengembangan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia.

Rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan, sebagaimana sering dipersoalkan, pada dasarnya bersumber pada sistem kelembagaan sosial, terutama pada masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan lokal dengan kontrol sosial yang ketat. Dalam situasi seperti itu pada umumnya masyarakat memperlihatkan partisipasi internal yang tinggi. Partisipasi ini menunjuk pada wujud kesetiaan terhadap norma yang berlaku dalam sistem sosial. Keadaan ini sudah tentu dapat menyebabkan rendahnya partisipasi eksternal, apabila program-program tertentu menurut pandangan mereka tidak selaras dengan sistem norma dan kelembagaan yang ada.

Pola pengembangan kelembagaan untuk mengentas kemiskinan dalam PJP II, lebih ditekankan pada pendekatan

terpadu. Menurut Schumacher (1986), bahwa makin luas suatu negara makin besar kebutuhan akan "struktur" setempat dan desentralisasi pengembangan. Dikatakan bahwa yang paling ideal, adalah setiap wilayah mempunyai semacam ikatan dan identitas, di samping struktur ekonomi perlu juga ada struktur kebudayaan. Jika kebutuhan ini diabaikan maka tak ada harapan bagi orang-orang miskin.

Kebutuhan tersebut menghendaki perlunya pemetaan sebaran desa-desa tertinggal di kawasan pedesaan menurut unit-unit komunitas sosial ekonomi yang terikat dalam suatu *culture area*, sehingga suatu komunitas sosial ekonomi merupakan: (a) sejumlah desa yang tergolong miskin, (b) secara umum penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, dan yang lainnya tetapi masih berkaitan erat, (c) terdapat dalam wilayah budaya dan wilayah geografis yang sama.

Suatu lembaga sosial ekonomi merupakan perpaduan dari semua lembaga lokal dan baru yang berperan dalam pembangunan sosial ekonomi dalam suatu komunitas. Penerapan model ini berimplikasi pada transformasi sosial secara mendasar,

antara lain ditandai dengan akan timbulnya pergeseran status dan peranan sosial dalam jangka panjang. Hal ini akan membuka peluang dan mendorong peningkatan partisipasi bagi petani atau golongan miskin.

Pola pengembangan kelembagaan terpadu dalam model komunitas dan bergerak dengan kekuatan partisipasi profesional bagi semua strata sosial ekonomi akan lebih mendorong pertumbuhan dan pemerataan secara bersama-sama. Apabila digunakan model pertumbuhan Smelser yang mengacu pada diferensiasi struktural, maka kelembagaan ini dapat berperan dalam mempersiapkan kerangka landasan untuk tahap-tahap pertumbuhan, mulai dari modernisasi teknologi, komersialisasi pertanian, industrialisasi dan urbanisasi (Long, 1992).

2.6. Pola Pengembangan Kelembagaan Sosial Ekonomi Pedesaan untuk Mengentaskan Kemiskinan Model Komunitas Sosial Ekonomi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, dihubungkan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan, upaya-upaya pengentasan yang telah dilakukan, dan perspektif mengenai peluang dan kendala yang dihadapi pada PJP II, maka

berikut ini dikemukakan suatu kerangka konseptual sebagai salah satu alternatif pemecahan, yaitu:

- a. Bila suatu masyarakat pedesaan terdiri atas bermacam-macam unit komunitas budaya, dan bila komunitas-komunitas tersebut tersebar menurut wilayah kebudayaan yang terkait dengan wilayah geografis tertentu, maka desa-desa yang ada di kawasan pedesaan tersebut lebih bersifat genealogis dari pada teritorial.
- b. Lembaga-lembaga sosial tradisional di desa-desa yang tercakup dalam suatu komunitas budaya lebih homogen dalam struktur dan fungsinya, demikian pula jenisnya. Warga komunitas yang sama dan berdekatan geografis menyebabkan komunitas-komunitas tersebut memiliki pola aktivitas ekonomi yang relatif sama.
- c. Dinamika kelembagaan sosial ekonomi tradisional mengalami *cultural lag* akibat mekanisme sistem sosial pedesaan sebagai suatu keseluruhan. Hal ini ditandai dengan ketimpangan fungsi kelembagaan sosial ekonomi dalam mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk

"keluar" dari mekanisme sistem, cenderung memperlihatkan partisipasi eksternal yang lebih tinggi. Golongan ini umumnya partisipasi eksternal yang lebih tinggi.

- f. Tugas kelembagaan sekarang (pada PJP II) adalah memobilisasi semua sumber daya di pedesaan secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan terpadu. Konsep ini tentu tidak membenarkan upaya untuk melepas atau memutuskan daya tarik ke dalam, melainkan bagaimana mendayagunakan kekuatan tersebut untuk mendorong perubahan sosial ekonomi pedesaan, sehingga makna keterpaduan dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak sekadar memadukan semua program sektoral dan regional, atau mempertemukan kebutuhan golongan miskin dengan kepentingan pemerintah dan swasta, tetapi juga menyatukan arah gerak dan mekanisme perubahan yang diciptakan melalui kelembagaan lokal dan baru. Sehingga model pengembangan masyarakat pedesaan perlu dirumuskan berdasarkan konsep keterpaduan sistem kelembagaan

sesuai dengan peta komunitas sosial ekonomi. Adapun eksistensi lembaga ini dalam kerangka pembangunan pedesaan adalah merupakan wadah induk yang menyelenggarakan aktivitas pembangunan sosial ekonomi dalam suatu komunitas pedesaan.

BAB III

PEMBAHASAN

Banyak model-model komunikasi yang dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi, namun tidak semua model komunikasi bisa berhasil secara efektif untuk digunakan di wilayah perdesaan yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial ekonomi melalui program pembangunan.

Menurut Susanto (1973) untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan perdesaan yang tinggi, diperlukan adanya strategi komunikasi yang tepat. Hanya dengan komunikasi yang tepatlah proses sosialisasi program-program pembangunan bisa berhasil dengan baik. Beberapa ahli komunikasi massa mensinyalir bahwa meskipun pelaksanaan pembangunan perdesaan telah dirancang dan dipersiapkan secara baik, tidak menjamin akan bisa dilaksanakan dan berhasil dengan baik apabila tidak didukung oleh metode komunikasi yang efektif. Dalam hal ini menurut (Dahlan;1977) sosialisasi

program pembangunan masyarakat perdesaan pada waktu itu dilakukan dengan menggunakan model komunikasi linier. Ketika itu pihak pemerintah sebagai *agent of change* dalam melakukan sosialisasi program pembangunan lebih banyak bersifat instruktif, berjalan searah dan disampaikan secara singkat.

Menurut Rogers (1985) model komunikasi sedemikian ini kurang tepat bagi masyarakat perdesaan, sebab komunikasi linier yang cenderung bersifat instruktif itu biasanya disampaikan melalui saluran-saluran formal. Sementara itu masyarakat perdesaan yang secara sosiologis, masih tergolong sebagai *primary society* itu relatif kurang bahkan tidak menyukai terhadap hal-hal yang bersifat formal, sehingga proses komunikasi model linier tidak berjalan secara efektif.

Berbeda dengan model komunikasi linier, komunikasi interaktif dalam menyampaikan pesannya tidak disampaikan melalui saluran formal, melainkan menggunakan saluran informal yang dibentuk secara swadaya dan swakelola oleh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hilbrink dan Lohman(1983) menunjukkan bahwa model komunikasi interaktif ternyata hasilnya lebih efektif untuk digunakan sebagai salah satu strategi dalam mensosialisasikan program-program pembangunan di pedesaan, karena komunikasi interaktif tidak bersifat instruktif dan penyampaiannya selalu dilewatkan melalui lembaga-lembaga informal pedesaan yang bersifat swakelola.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ratih Cs; 1999) menunjukkan bahwa komunikasi interaktif ternyata berhasil secara efektif dalam hal memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan, dan mampu menumbuhkan partisipasi positif bagi masyarakat pedesaan dalam pembangunan. Keberhasilan komunikasi interaktif sebagai sarana sosialisasi program pembangunan masyarakat desa ini menurut Rogers (dalam Gonzales; 1977), karena model komunikasi interaktif memiliki kelebihan dibandingkan dengan model komunikasi linier untuk diterapkan di wilayah pedesaan.

Kelebihan model komunikasi ini, salah satunya adalah terletak pada prosesnya yang berjalan secara menyebar kesegala arah sehingga arus informasi tidak berjalan satu arah yang dapat dianggap sebagai suatu instruksi, melainkan berjalan secara timbal balik dari dan kesegala arah diantara pihak-pihak yang terlibat. Artinya diantara mereka yang terlibat dalam proses komunikasi terdapat proses saling mempengaruhi, memberi dan menerima informasi secara seimbang guna membentuk kesamaan pengertian diantara mereka (Hang Kueng; 1994). Kelebihan lain dari model komunikasi interaktif ini adalah adanya kesamaan posisi antara pihak *communicant* dengan *communicator* nya, sehingga diantara mereka yang terlibat komunikasi tidak ada perasaan *inferior* dan *superior*, dan hasil komunikasinya dianggap sebagai *sharing*.

BAB IV

PENUTUP

Mengingat model komunikasi interaktif terbukti sangat cocok bagi masyarakat desa, maka tidak ada salahnya apabila pihak pemerintah daerah di era otonomi ini mengadopsi model komunikasi ini sebagai sarana sosialisasi program-program pembangunan di perdesaan, dengan harapan agar kesenjangan pemerataan pembangunan desa-kota dapat segera dieleminir. Era otonomi seyogyanya disikapi secara arif oleh pemerintah daerah, dalam artian bahwa keluasan dan perluasan kewenangan yang dimilikinya hendaknya bisa dipandang secara proporsional, yakni disamping sebagai peluang juga sekaligus tantangan, terutama dalam hal melaksanakan pembangunan di wilayah perdesaan.

Dalam memandang otonomi sebagai peluang, disamping pihak pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya juga harus bertindak dengan secepat-cepatnya untuk

segera melakukan pembangunan wilayah perdesaan secara terarah dan proporsional.

Sedangkan dalam memandang otonomi sebagai hambatan, pemerintah harus berfikir bahwa pembangunan wilayah perdesaan merupakan tugas berat yang harus segera dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, untuk membuktikan bahwa pihak pemerintah daerahlah yang merupakan lembaga paling tepat dalam menyusun strategi pembangunan yang ada di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Budi Santoso dan Parsudi Suparlan 1977, *Sistem Komunikasi Dalam Masyarakat Indonesia*, Hasil Penelitian, Leknas/LIPI, Deppen RI, Jakarta.
- Dahlan, Alwi, 1977, *Sistem-sistem Komunikasi yang Memadai di Indonesia*, Hasil Penelitian dengan PT Incore dengan Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan RI, Deppen, Jakarta.
- Depari, Eduard, dan Colin, Mac Andrews 1988, *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hang Kueng, 1994, *Mencari Alternatif Model Komunikasi Dalam Pembangunan Pedesaan*, Tanpa Penerbit Yogyakarta.
- Hilbrink, Albert, 1988, *Forum Siaran Pedesaan di Indonesia*, Dalam Edward Depari dan Colin
- Mac Andrews (ed) *Peranan Komunikasi Masa Dalam Pembangunan*. Gadjah Mada. University Press, Yogyakarta.
- Khairuddin, H, 1992, *Pembangunan Masyarakat*, Penerbit. Liberty, Yogyakarta.
- Rogers, Everett, 1975, *Network Analysis of The Diffusion of Innovation*, Institute for Communication Research. Stanford University.
- Susanto, Astrid, S, 1977, *Komunikasi Kontemporer*. Binacipta Bandung

Worsley, Peter et. Al, 1992, *Pengantar Sosiologi sebuah Perbandingan*.
PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.